

DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur

- Hadjon, Philipus M. 1993. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Harahap, Zairin. 2005. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- HR, Ridwan. 2011. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Indroharto. 1993. *“Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara” Buku I*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- MD, Mahmud. 1999. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta : Gama Media.
- Marbun, S.F. 2002. *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta : UII Press.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 2005. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang PTUN 2004*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Setiadi, Wicipto. 1994. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Suatu Perbandingan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Tjandra, W. Riawan. 2005. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Wijoyo, Suparto. 2005. *Karakteristik Hukum Acara Peradilan Administrasi (Peradilan Tata Usaha Negara), Edisi Kedua*. Surabaya : Airlangga University Press.
- Wiyono, R. 2009. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Yanto, Nur. 2015. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta : Mitra Wacana Media.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 24/G/2013/PTUN.YK.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344).

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4380).

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5079).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292).

Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.